

**PARTISIPASI DESA WISATA NGLANGGERAN YOGYAKARTA
DALAM “BEST TOURISM VILLAGES” PADA UNITED NATION WORLD
TOURISM ORGANIZATION (UNWTO) TAHUN 2021**

Oleh : Fatma Bella

Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP, MA

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Desa Wisata Nglanggeran merupakan salah satu desa di Yogyakarta yang masuk dalam nominasi “*Best Tourism Villages*” yang diselenggarakan oleh *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) pada tahun 2021. Dalam mengikuti “Desa Wisata Terbaik” Desa Wisata Nglanggeran direkomendasikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan menghubungi Dinas Pariwisata Gunung Kidul untuk mengatur agar Desa Wisata Nglanggeran mendaftar menjadi peserta “*Best Tourism Villages*”.

Penelitian kualitatif ini menanyakan tentang Paradiplomasi Desa Wisata Nglanggeran di kancah internasional. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan data yang bersumber dari jurnal, berita, wawancara langsung dan dokumen resmi. Peneliti menggunakan teori paradiplomasi untuk menganalisis data dan memperoleh hasil.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Wisata Nglanggeran menggunakan paradiplomasi untuk berkiprah di dunia internasional. Strategi yang dilakukan Desa Wisata Nglanggeran untuk masuk dalam “*Best Tourism Villages*” mengalahkan dua wakil lainnya yaitu Desa Wisata Wae Rebo NTT dan Desa Wisata Tetebatu NTB karena kriteria pengembangan Desa Wisata Nglanggeran yang bersifat multidisiplin dan inovatif. Desa sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Keikutsertaan desa-desa tersebut merupakan rekomendasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku pemerintah pusat yang ikut berkontribusi bersama Dinas Pariwisata daerah sebagai pemerintah daerah serta melibatkan kelompok masyarakat untuk membentuk paradiplomasi yang membuktikan bahwa daerah otonom tidak bisa berkiprah di kancah internasional secara mandiri tanpa keterikatan pada pemerintah pusat.

Kata Kunci : Desa Wisata Nglanggeran, Best Tourism Villages, UNWTO, Paradiplomasi, SDGs.

ABSTRACT

Nglanggeran Tourism Village is one of the villages in Yogyakarta that has been nominated for "Best Tourism Villages" organized by the United Nation World Tourism Organization (UNWTO) in 2021. In participating in "Best Tourism Villages" Nglanggeran Tourism Village was recommended by the Ministry of Tourism and Creative Economy and contacted the GunungKidul

Tourism Office to arrange for the Nglanggeran Tourism Village to register as a participant in the "Best Tourism Villages".

This qualitative research asks about the Paradiplomacy of the Nglanggeran Tourism Village in the international arena. To answer this question, data is needed from journals, news, direct interviews and official documents. Researchers use paradiplomacy theory to analyze data and obtain results.

This research shows that the Nglanggeran Tourism Village uses paradiplomacy to take part in the international world. The strategy carried out by the Nglanggeran Tourism Village to participate in the "Best Tourism Villages" beat two other representatives, the Wae Rebo Tourism Village, NTT and the Tetebatu Tourism Village, NTB, due to the multidisciplinary and innovative development criteria for the Nglanggeran Tourism Village in accordance with the Sustainable Development Goals (SDGs). The participation of these villages is a recommendation from the Ministry of Tourism and Creative Economy as the central government which contributes with the department regional tourism as local government and involving community groups to form paradiplomacy which proves that autonomous regions cannot take part in the international arena independently without any attachment to the central government.

Keywords : Nglanggeran Tourism Village, Best Tourism Villages, UNWTO, Paradiplomacy, SDGs.

PENDAHULUAN

Pariwisata Internasional merupakan aktivitas seseorang yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan tinggal ditempat-tempat luar negeri secara permanen dengan jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan untuk liburan, bisnis dan lainnya adapun terdapat secara meluas mengenai industri pariwisata yang mencakup kegiatan sosial ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa berbagai sektor, seperti komunikasi, transportasi, penginapan, makanan, minuman, budaya dan hiburan kepada wisatawan.¹

Kegiatan pariwisata internasional terus mengalami perkembangan yang besar dan berkelanjutan baik dari segi pendapatan pariwisata maupun jumlah wisatawan dan telah meninggalkan jejak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan secara meluas hingga menjangkau hampir seluruh bagian dunia termasuk bagian negara berkembang. Oleh karena itu, beberapa tahun terakhir, pembangunan pariwisata telah mendapat banyak perhatian dalam strategi pembangunan nasional di negara - negara berkembang dan dimasukkan dalam banyak agenda konferensi internasional mengenai pembangunan berkelanjutan.

United Nation World Tourism Organization atau UNWTO merupakan organisasi pariwisata dunia di bentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 1 November 1975 yang bermarkas di Madrid, Spanyol dengan tujuan untuk mempromosikan pariwisata sebagai

pendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, kelestarian lingkungan dan memajukan kebijakan pariwisata secara universal. UNWTO mendorong penerapan kode etik pariwisata global dengan memaksimalkan sosial ekonomi pariwisata dengan berkomitmen mendorong pariwisata untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang penerapannya terdapat untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan Pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.²

Pada tahun 2021 UNWTO membentuk suatu ajang yakni “*Best Tourism Villages*” untuk mencari desa-desa disuatu negara sebagai percontohan dalam mengembangkan pariwisata dengan memberdayakan komunitas masyarakat setempat, melestarikan tradisi dan warisan lokal.³ Dalam ajang tersebut, UNWTO menilai dan akan memilih desa yang terbaik berdasarkan inovasi dan transformasi sesuai dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* tujuan ajang *Best Tourism Villages* diadakan untuk memaksimalkan kontribusi desa wisata dan mengurangi kesenjangan dipedesaan dengan julukan tersebut desa wisata mendapatkan pengakuan internasional sebagai contoh praktik destinasi terbaik wisata pedesaan.

¹ International Tourism In D-8 Member States : Status And Prospects. Statical, Economic And Social Research And Training Centre For Islamic Countires. <https://sesricdiag.blob.core.windows.net/sesric-site-blob/files/article/654.pdf> (diakses Aug, 24, 2023)

² UNWTO, “About UN Tourims” diakses dari <https://www.unwto.org/who-we-are> pada tanggal 1 Januari 2024.

³ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Desa Wisata Nglanggeran Jadi Wakil Indonesia Pada Ajang Best Tourism Villages UNWTO diakses pada <https://www.kemendparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Desa-Wisata-Nglanggeran-Jadi-Wakil-Indonesia-pada-Ajang-Best-Tourism-Village-UNWTO> pada tanggal 25 Agustus 2023.

Pada tahun 2020 dunia sedang dilanda dengan Covid-19 yang berdampak besar bagi pariwisata dengan pengunjung wisatawan internasional turun dari tahun sebelumnya yakni 2019 dikarenakan meluasnya pembatasan perjalanan dan penurunan permintaan secara besar-besaran yang menjadi suatu tantangan dan peluang untuk meningkatkan peran sektor tetapi masyarakat di pedesaan kurang siap menghadapi penurunan pariwisata, permintaan wisatawan akan pengalaman baru seputar alam, budaya dan produk lokal serta keterlibatan masyarakat dalam konteks pasca Covid-19 yang menawarkan peluang besar untuk mendukung pembangunan pedesaan.⁴

UNWTO menetapkan pada tahun 2020 sebagai tahun” Pariwisata dan Pembangunan Pedesaan Panduan Untuk Menjadikan Pariwisata Sebagai Alat Yang Efektif Untuk Pembangunan Pedesaan” yang diselenggarakan di Madrid, Spanyol dengan tujuan membantu pemerintah, sektor wisata dan komunitas internasional serta menguraikan langkah-langkah penting yang diperlukan untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi dan ketahanan pariwisata untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah pedesaan.

⁴ *Best Tourism Villages* by UNWTO, “*Term and Conditions 2022*”, https://www.unwto.org/tourism-villages/wp-content/uploads/2022/03/Terms-and-Conditions_EN-2022-1.pdf (di akses Aug, 26, 2023)

KERANGKA TEORI

1. Perspektif Pluralisme

Pluralisme merupakan sebuah perspektif dalam hubungan internasional yang mengakui keberagaman aktor dalam hubungan internasional khususnya pada aktor *non- state*, Pluralisme memandang bahwa keberadaan aktor-aktor tersebut dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam hubungan internasional, terdapat beberapa asumsi dasar yang mendukung pandangan Pluralisme antara lain:

- Negara bukan merupakan aktor tunggal dalam Hubungan Internasional.
- Aktor *Non- State* mampu membangun sistem internasional yang baru (globalisasi).
- Menentang asumsi realisme yang menyatakan bahwa negara merupakan aktor rasional di karenakan kebijakan luar negeri pada negara oleh proses-proses sosial yang berpihak.
- Mendukung agenda politik yang luas dan tidak membahas mengenai negara sebagai power, keamanan, militer tetapi juga isu-isu lainnya.⁵

Menurut pandangan pluralisme negara bukan aktor tunggal karena negara terdiri dari para birokrat, kelompok kepentingan dan individu-individu yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan kebijakan dan aktor non state juga berpartisipasi mengambil kebijakan yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya dalam proses pengambilan kebijakan.

Negara bangsa bukan entitas terintegrasi

⁵ M. Saeri. “Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik”. *Jurnal Transnasional*, Vol.3, No 2, (Februari 2012), Hal 15-17.

karena negara dan aktor *non state* sering terlibat dalam memformulasikan aktifitas dan hubungan internasional serta menimbulkan dan menerima akibat dari aktifitas internasionalnya.⁶

Pluralisme mencakup secara umum untuk semua pendekatan pergaulan dan tindakan individu dalam kelompok sebagai titik awal dan konsep ini seperti politik kelompok kepentingan, tata kelola asosiasi dan pembagian kekuasaan politik. Aktor *non state* atau suatu kelompok mendominasi dibidang kebijakan publik seperti pendidikan, nominasi jabatan publik dan pembaruan perkotaan, dalam hal ini pandangan pluralisme menekankan politik internasional dapat dibangun melalui berbagai kelompok agar terciptanya kepentingan yang bekerjasama dengan pemerintah negara untuk mencapai suatu tujuan.⁷

2. Level Analisa : Negara

Tingkat analisa yang kelima yakni negara bangsa, pada tingkat ini berasumsi bahwa semua pembuat keputusan di mana pun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama, oleh karena itu, analisa yang menekankan perbedaan antara perilaku sekelompok pembuat keputusan di suatu negara dengan sekelompok lainnya di negara lain akan dianggap sia-sia dan di tekankan pada perilaku unit negara-negara bangsa karena hubungan internasional yang di didominasi oleh perilaku negara bangsa.⁸ Dalam penelitian ini melibatkan tingkat analisa negara bangsa pada

⁶ Ibid

⁷ Roland, Czada. 2020. Pluralism. In: The SAGE Handbook of Political Science, Vol. 2, eds. D. Berg- Schlosser, B. Badie and L. Morlino, pp. 567-571 : Sage Publications.

⁸ Ibid

Indonesia khususnya Desa Wisata Nglanggan yang termasuk sebagai aktor.

3. Teori Paradiplomasi

Paradiplomasi merupakan kajian relatif baru dalam hubungan internasional yang mengacu pada perilaku dan kapasitas dalam melakukan hubungan luar negeri yang dilakukan entitas "*substate*" (dalam rangka kepentingan mereka dalam spesifik).⁹

Istilah Paradiplomasi diambil dari kata "paralel diplomasi" yang mengacu pada makna *The Foreign Policy of Non Central Government*. Istilah lain dari Paradiplomasi ialah mikrodiplomasi, dimana partisipasi pemerintah lokal atau daerah otonom telah bangkit dalam gerilya partisipasinya untuk berkiprah secara internasional sebagaimana pemerintah daerah untuk ikut dalam ajang pariwisata internasional telah mengubah pikiran yang mendasar tentang kedaulatan negara secara fundamental. Pada teori Paradiplomasi juga dapat dilihat bahwa pemerintah pusat telah membagi- bagi kedaulatan atau kekuasaan kepada pemerintah daerah, batasan kekuasaan tersebut berbeda-beda tergantung negara dan hubungan pusat dengan daerah, apakah bersifat kooperatif atau konfliktual juga turut mempengaruhi seberapa jauh pemerintah daerah dapat berperan atau bergerak, salah satunya dalam interaksi luar negeri.¹⁰

Terdapat dua indikator bentuk Paradiplomasi umum negara kesatuan (*Unitary*) yakni *Cooperatif join* dan *Paralel Harmony*.

1. *Cooperatif Join* yakni dengan

⁹ Stefan Wolff. 2009. *Paradiplomacy : Scope, Opportunities and Challenges*, Hal 1-2, University Nottingham

¹⁰ David Crikemans. 2008. "Are The Boundaries Between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?" Hal 34, University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy.

memasukkan suatu agenda kebijakan daerah ke dalam kebijakan internasional, dalam hal ini melakukan pendekatan antara pemerintah pusat dan *non* pusat melalui strategi bersama yang menargetkan masalah kebijakan luar negeri.

2. *Paralel Harmony* yakni dengan upaya pemerintah daerah melalui diplomasi mereka sendiri atau mandiri untuk mencapai tujuan spesifik daerah dalam hal ini, pemerintah daerah membuat keputusan diakui secara sah dan posisi pemerintah daerah melengkapi kebijakan dari pemerintah pusat harmonis, tidak kontradiktif dan aktivitas luar negeri pemerintah daerah dapat dilakukan tanpa harus melalui pengawasan pemerintah pusat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang di gunakan oleh peneliti dalam menulis penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif, metode kualitatif deskriptif menggunakan *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yang akan diamati oleh peneliti secara mendalam yakni, aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang di wawancarai dilakukan secara dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang tahu tentang situasi sosial tersebut lalu dijadikan sebagai pedoman dan referensi peneliti untuk menentukan

hasil yang akan diteliti.¹¹

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam menulis penelitian ini ialah dengan sumber primer yang merupakan sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data. melakukan observasi (pengamatan) objek yang di teliti lalu melakukan *interview* (wawancara) tanya jawab dengan responden dan dokumentasi serta gabungan atau triangulasi, adapun peneliti melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber yang tertulis dari pustaka, website resmi, jurnal-jurnal terdahulu dan buku.¹²

Teknik yang di lakukan penulis diawali pengumpulan data dengan membaca dan memahami sumber-sumber kemudian memilah data yang telah di dapatkan sebagai acuan untuk membandingkan seberapa penting data tersebut selanjutnya peneliti turun lapangan dengan melakukan pengamatan, wawancara, dokumentasi serta gabungan atau triangulasi pada tempat yang akan diteliti dan yang tahap terakhir dibuat kesimpulan dari hasil data- data yang di susun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO)

United Nation World Tourism Organization atau UNWTO merupakan organisasi pariwisata dunia di bentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 1 November 1975 yang

¹¹ Prof. Dr. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 2017: ALFABETA. 215-216.

¹² Ibid, Hal 224-225.

bermarkas di Madrid, Spanyol dengan tujuan untuk mempromosikan pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, kelestarian lingkungan dan memajukan kebijakan pariwisata secara universal. UNWTO mendorong penerapan kode etik pariwisata global dengan memaksimalkan sosial ekonomi pariwisata dengan berkomitmen mendorong pariwisata untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang penerapannya terdapat untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan Pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.¹³

Keanggotaan UNWTO terdiri dari 160 negara yakni enam wilayah Belgia, Puerto Riko, Aruba, Hongkong, Makau dan Medeira, terdapat dua anggota pengamat tetap yakni Vatikan dan Palestina. Terdapat 17 negara anggota yang telah mengundurkan diri dari organisasi UNWTO untuk periode yang berbeda dimasa lalu tetapi beberapa negara kembali menjadi keanggotaan yakni Australia, Bahama, Bahrain, Belgia dan Kanada. Anggota Asosiasi terdiri dari Kosta Rika, El Salvador, Grenada, Honduras, Kuwait, Latvia, Malaysia, Myanmar, Panama, Filipina, Qatar, Thailand, Inggris dan UEA.¹⁴

2. Badan-Badan Kepengurusan UNWTO

Manajemen UNWTO terdiri atas Sekretaris Jenderal yang mulai di jabat oleh Zurab Pololikashvili pada tahun

2018, agar mengoptimalkan efisiensi keorganisasian Zurab membentuk wakil Sekretaris Jenderal dan dua Direktur Eksekutif masing-masing mengawasi bidang struktural utama dan departemen organisasi agar meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan UNWTO termasuk menambah nilai anggota, meningkatkan keanggotaan dan melayani sektor pariwisata secara keseluruhan.¹⁵ Untuk mewujudkan kinerja UNWTO terdapat badan-badan yang memiliki kewenangan dalam memenuhi tujuan tersebut yakni :

- Majelis Umum

Majelis umum merupakan pertemuan utama organisasi pariwisata dunia dengan melaksanakan pertemuan setiap dua tahun dihadiri oleh delegasi dari anggota penuh, asosiasi UNWTO dan perwakilan anggota afiliasi UNWTO untuk menyetujui anggaran dan program kerja serta membahas topik-topik penting bagi sektor pariwisata. Dalam pertemuan ini dianggap pertemuan global penting yang dihadiri para pejabat senior pariwisata dan perwakilan tinggi sektor pariwisata.¹⁶

- Komisi Daerah

Pada tahun 1975 di bentuk organ pendukung majelis umum dengan enam komisi regional yang biasanya melakukan pertemuan setahun sekali, dalam hal ini memungkinkan negara-negara anggota menjaga kontak satu sama lain dengan sekretariat diantara sesi-sesi mejelis umum yang mana mereka akan menyampaikan permasalahan mereka dan komisi yang hadir terdiri dari seluruh anggota asosiasi dari belahan dunia.

¹³ UNWTO, "About UN Tourism" diakses dari <https://www.unwto.org/who-we-are> pada tanggal 1 Januari 2024.

¹⁴ UNWTO, "Member States" diakses dari <https://www.unwto.org/member-states> pada tanggal 1 Januari 2024.

¹⁵ UNWTO, "Our Management" diakses dari <https://www.unwto.org/management> pada tanggal 1 Januari 2024.

¹⁶ UNWTO, "General Assembly" diakses dari <https://www.unwto.org/unwto-general-assembly> pada tanggal 1 Januari 2024.

- **Dewan Eksekutif**

Bertugas mengambil semua tindakan lalu berkonsultasi dengan Sekretariat Jenderal untuk melaksanakan keputusan-keputusannya sendiri dan pemasukan dari majelis, lalu melaporkan ke majelis dengan tujuan mencapai distribusi geografis yang merata.

- **Komite Khusus**

Merupakan organ tambahan dari Dewan Eksekutif yang memberikan nasihat mengenai manajemen dan isi program, dalam hal ini yang termasuk komite khusus terdiri dari : komite program dan anggaran, komite statistik, komite pariwisata dan daya saing, komite pariwisata dan keberlanjutan, komite Pendidikan online pariwisata, komite etika pariwisata dunia dan komite terkait keanggotaan afiliasi.¹⁷

- **Sekretariat**

Sekretariat UNWTO di pimpin oleh Sekretaris Jenderal yakni Zurab Pololikashvili dengan kantor pusat bermarkas di Madrid, Spanyol yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program kerja UNWTO dan melayani kebutuhan anggota. Sekretariat mencakup kantor dukungan regional untuk Asia-Pasifik di Nara, Jepang, Bahasa resmi yang digunakan UNWTO yakni Arab, Tiongkok, Inggris, Rusia, Perancis dan Spanyol.¹⁸

¹⁷ UNWTO, “Committees” diakses dari <https://www.unwto.org/unwto-committees> pada tanggal 2 Januari 2024.

¹⁸ UNWTO, “Governing Bodies” diakses dari <https://www.unwto.org/structure> pada tanggal 2 Januari 2024.

3.Pembentukan “Best Tourism Villages”

Best Tourism Villages merupakan suatu ajang internasional yang dibentuk oleh UNWTO dalam memajukan pariwisata di desa-desa seluruh dunia dengan melestarikan sumber daya alam, budaya, dan tradisi serta menjaga keanekaragaman hayati khususnya melalui pendekatan inovatif dan transformatif terhadap pengembangan destinasi pariwisata didesa yang sesuai dengan ekonomi, sosial, lingkungan serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).¹⁹

Manfaat mengikuti *Best Tourism Villages* agar desa-desa yang mendapat pengakuan “*Best Tourism Villages*” oleh UNWTO akan mendapatkan keuntungan dari visibilitas dan pengakuan internasional sebagai contoh luar biasa dari sebuah destinasi yang mempromosikan dan melestarikan keanekaragaman hayati, budaya dan aktivitas masyarakat lokal seperti pertanian, peternakan, kehutanan serta berkomitmen terhadap keberlanjutan dalam seluruh aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan tujuan mendasar yang menjadikan pariwisata termasuk pendorong pembangunan pedesaan dan kesejahteraan masyarakatnya.

4.Strategi Desa Wisata Nglanggeran Yogyakarta Dalam “Best Tourism Villages” Pada United Nation World Tourism Organization (UNWTO) Tahun 2021

Pemerintah Pusat berwenang memilih desa-desa untuk perwakilan

¹⁹ UNWTO, “Best Tourism Villages Initiative” diakses dari <https://www.unwto.org/tourism-villages/wp-content/uploads/2023/03/230321-Best-Tourism-Villages-En-alta-1.pdf> pada tanggal 19 Februari 2024

negara dalam mengikuti “*Best Tourism Villages*” yang merupakan nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dengan mengirimkan tiga desa sesuai ketentuan persyaratan untuk mengikuti “*Best Tourism Villages*” maksimal tiga desa yakni Desa Wisata Wae Rebo NTT, Desa Wisata Tetebatu NTB dan Desa Wisata Nglanggeran Yogyakarta, tetapi hanya Desa Wisata Nglanggeran Yogyakarta yang merupakan pemenang ajang tersebut, dalam hal ini, yang berperan merupakan otoritas pariwisata suatu negara yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.²⁰ Melalui pengajuan Kemenparekraf akan menghubungi pemerintah daerah yang merupakan badan pariwisata daerah.

Tanggal 26 Mei 2021 pendaftaran “*Best Tourism Villages*” dibuka hingga tanggal 15 September 2021 dan Dewan Penasihat UNWTO akan menyeleksi kelengkapan formulir peserta dari tanggal 16 September hingga bulan Oktober, untuk mengikuti “*Best Tourism Villages*” setiap negara dan desa-desa perwakilannya tidak dipungut biaya dan penilaian akan dilakukan oleh Dewan Penasihat UNWTO melalui online dengan mengevaluasi kelengkapan dokumen yang telah diupload.²¹ Skala penilaian memiliki rentang 0-100 dengan predikat untuk mendapatkan pengakuan “*Best Tourism Villages*” harus diatas 80, apabila suatu negara terdapat ketiga desa perwakilannya

mendapatkan nilai diatas 80 maka ketiganya berhak mendapatkan pengakuan tersebut jika suatu negara tidak ada desa-desa perwakilannya yang mencapai target maksimal penilaian oleh Dewan Penasihat UNWTO maka tidak termasuk dalam pengakuan karna tidak harus setiap negara untuk mendapatkan pengakuan “*Best Tourism Villages*”.²²

Pada sidang majelis umum UNWTO ke-24 yang diadakan tanggal 2 Desember 2021 di Madrid, Spanyol mengumumkan desa-desa yang dinobatkan sebagai “*Best Tourism Villages*” termasuk Indonesia sebagai pemenangnya Desa Wisata Nglanggeran Yogyakarta. Dalam hal ini, partisipasi yang dilakukan Desa Wisata Nglanggeran untuk mengikuti “*Best Tourism Villages*” telah membentuk Paradiplomasi karena suatu pemerintahan lokal atau otonom dapat berpartisipasi menuju dunia Internasional dan salah satu indikator dari teori Paradiplomasi yang diperankan oleh Desa Wisata Nglanggeran yakni *Cooperatif Join* dengan memasukkan agenda kebijakan suatu daerah pada kebijakan internasional, untuk itu melakukan pendekatan pemerintah pusat dan non pusat melalui strategi bersama yang menargetkan kebijakan luar negeri antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang memiliki partisipasi bersama sehingga membentuk keputusan normatif.

Potensi Desa Wisata Nglanggeran Dalam Menuju “*Best Tourism Villages*”

- Embung Nglanggeran
Pada tahun 2012 Desa Wisata Nglanggeran mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah

²⁰ Kemenparekraf, “*PPID Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi*” diakses dari <https://ppid.kemenparekraf.go.id/> pada tanggal 15 Maret 2024.

²¹ UNWTO, “*Best Tourism Villages by UN Tourism Terms and Conditions*” diakses dari https://www.unwto.org/tourism-villages/wp-content/uploads/2024/01/Terms-and-Conditions_EN_2024.pdf pada tanggal 15 Maret 2024.

²² Sugeng Handoko, S.T, wawancara oleh Fatma Bella pada tanggal 30 Januari 2024.

Daerah untuk mendukung kegiatan kepariwisataan pembuatan Embung Nglanggeran dan kebun buah Nglanggeran dipuncak gunung dengan perencanaan pemerintah Kabupaten GunungKidul melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Bappeda Kabupaten Gunung Kidul menghabiskan dana kurang lebih 17.000.000.000 sesuai *Detail Enginerig Design* dikarenakan disana layak untuk dikembangkan durian dan kelengkeng, tetapi awal dibangun Embung Nglanggeran hanya berfungsi sebagai pancuran seiring berjalannya waktu program penanaman durian dan kelengkeng mengalami kekeringan lalu solusinya Embung Nglanggeran dibentuk dengan danau buatan sebagai penampung air hujan sehingga di musim kemarau air hujan tersebut bisa menyirami tanaman durian dan kelengkeng.²³

-Community Based Tourism (CBT)
Community Based Tourism (CBT) merupakan suatu konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan komunitas sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan kepariwisataan dan kemanfaatan tersebut akan menjadi hasil yang diperuntukkan masyarakat. Sebagian besar pekerjaan masyarakat Desa Wisata Nglanggeran merupakan petani dan peternak, dikarenakan wilayah tersebut sangat asri sehingga banyak terdapat sawah, perkebunan singkong, perkebunan pisang, perkebunan kakao, dan ternak kambing.²⁴

Pada tahun 2017 Desa Wisata Nglanggeran mendapatkan nominasi *ASEAN Community Based Tourism (CBT) Award* yang dilaksanakan pada kegiatan *ASEAN Tourism Forum 2017* yang diadakan di Singapura.

KESIMPULAN

Agenda Internasional telah mendorong pemerintah daerah otonom untuk bangkit dalam partisipasinya berkiprah secara internasional untuk mencapai suatu tujuan, sebagaimana yang dilakukan oleh Desa Wisata Nglanggeran untuk ikut dalam ajang pariwisata internasional yang telah mengubah pikiran mendasar mengenai kedaulatan negara secara fundamental menimbulkan Paradiplomasi.

Desa Wisata Nglanggeran terletak di wilayah GunungKidul yang memiliki keindahan alam dan kelestarian budaya tetap terjaga, strategi pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Nglanggeran sudah dijalankan oleh POKDARWIS dari tahun 2008 hingga saat ini membuat Desa Wisata Nglanggeran telah banyak mendapatkan penghargaan karena ikut berpartisipasi dalam berbagai *event*, termasuk pada tahun 2021 Desa Wisata Nglanggeran direkomendasikan oleh Kemenparekraf sebagai perwakilan Indonesia dengan dua desa lainnya Desa Wisata Wae Rebo NTT dan Desa Wisata Tetebatu NTB untuk mengikuti ajang "*Best Tourism Villages*" dan Indonesia masuk dalam nominasi tersebut dengan dimenangkan oleh Desa Wisata Nglanggeran, dalam hal ini, membuktikan bahwa Desa Wisata Nglanggeran termasuk desa yang multidisiplin secara integritas dalam berbagai bidang relavan baik dengan pariwisata maupun pembangunan infrastruktur pedesaan.

²³ Desa Wisata Nglanggeran, "*Gunung Api Purba Nglanggeran*" dikutip dari PPT Nglanggeran 2022.

²⁴ Sri Suryani, wawancara oleh Fatma Bella pada tanggal 30 Januari 2024.

Keikutsertaan Desa Wisata Nglanggeran untuk berkompetisi dalam “*Best Tourism Villages*” membuktikan teori Paradiplomasi bahwa pemerintah daerah otonom tidak bisa secara mandiri menuju dunia internasional tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, karna segala bentuk kebijakan pemerintah daerah otonom harus mengikat kepada ketentuan pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

International Tourism In D-8 Member States : Status And Prospects. Statiscal, Economic And Social Research And Training Centre For Islamic Countries.

UNWTO, “About UN Tourism” diakses dari <https://www.unwto.org/who-we-are> .

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Desa Wisata Nglanggeran Jadi Wakil Indonesia Pada Ajang Best Tourism Villages UNWTO, diakses pada <https://www.kememparekraf.go.id/ragam-> .

Best Tourism Villages by UNWTO, “Term and Conditions 2022” diakses dari <https://www.unwto.org/tourism-villages/wp->.

Saeri. M, “Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik”. Jurnal Transnasional, Vol.3, No 2, (Februari 2012), Hal 15-17.

Czada. R. 2020. Pluralism In : The SAGE Handbook of Political Science, Vol. 2, eds D. Berg-Schlosser, B. Badie and L. Morlino, pp. 567-571 : Sage Publications.

Wolf, S. 2009. Paradiplomacy : Scope, Opportunities and Challenges, Hal 1-2, University Nottingham.

C, David. 2008. “Are The Boundaries Between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?” Hal 34, University of Answerp and Flemish Centre for International Policy.

UNWTO, “Member States” diakses dari <https://www.unwto.org/member-states> .

UNWTO, “Our Management” diakses dari <https://www.unwto.org/management> .

UNWTO, “General Assembly” Diakses dari <https://www.unwto.org/unwto-general-assembly> .

UNWTO, “Countries” diakses dari <https://www.unwto.org/unwto-committees> .

UNWTO, “ Governing Boundies” diakses dari <https://www.unwto.org/structure>.

UNWTO, “ Best Tourism Villages Initiative” diakses dari <https://www.unwto.org/tourism-> .

Kememparekraf, “PPID Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi” diakses dari <https://ppid.kememparekraf.go.id/> .

UNWTO, “ Best Tourism Villages by UN Tourism Term and Conditions” diakses dari <https://www.unwto.org/tourism-villages/wp-> .

Desa Wisata Nglanggeran” Gunung Api Purba Nglanggeran” dikutip dari PPT Nglanggeran 2022.